

EKONOMI ISLAM SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF KRISIS EKONOMI EROPA

Djoko Setyo Hartono

Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Semarang

Jl. Kasipah No. 12 Semarang Telp. (024) 8502720

Email : djoko_unimus@yahoo.com

Abstrak

Permasalahan krisis ekonomi kembali terulang kembali di kawasan global yang diawali dari krisis ekonomi di negara Yunani. Krisis yang ditimbulkan dari defisit keuangan negara akibat utang negara yang sangat besar berdampak pada krisis ekonomi di kawasan Eropa. *Economic crisis fase* ini sebagai wujud kegagalan sistem ekonomi kapitalis yang dipaksakan oleh negara-negara barat. Banyak para pakar ekonom mulai membuka wacana untuk meninjau ulang sistem ekonomi yang ada karena ternyata tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Ekonomi Islam mulai dekade tahun 1970an sudah mulai banyak dikaji oleh berbagai universitas didunia, yang pada akhirnya diimplementasikan dengan dengan dibentuknya IDB (Islamic Development Bank) pertama di Jeddah. Hal ini kemudian berlanjut dengan berdirinya lembaga cara mendistribusikan kekayaan tersebut di masyarakat (*tauzi'ul tsarwah bayna an-naas*) keuangan dengan sistem ekonomi Islam. Adanya 3 (tiga) asas ekonomi Islam yang meliputi : asas cara memperoleh harta kekayaan (*al milkiyah*), cara mengelola kepemilikan harta kekayaan yang telah dimiliki (*tasharuruf fil milkiyah*). Kepemilikan harta kekayaan di sistem ekonomi Islam terdiri dari kepemilikan individu, negara dan umum secara seimbang. Sehingga diharapkan akan adanya kesejahteraan yang lebih merata dan tentunya adanya nilai moral bagi semua pelaku ekonomi.

Kata kunci : *economic crisis, tauzi'ul tsarwah bayna an-naas, al milkiyah, tasharuruf fil milkiyah*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Zona Eropa kembali terguncang oleh adanya krisis ekonomi, yang diakibatkan oleh ketidakmampuan negara-negara di eropa dalam membayar hutangnya. Besaran angka yang muncul mengejutkan banyak pihak jika dilihat dari sudut pandang angka dasar ekonomi. Jika kita mengingat kembali, bahwa krisis ekonomi ekonomi di Eropa dimulai dari negara Yunani pada tahun 2009 yang tampak dari defisit anggaran yang mencapai angka 143 % dari *produk domestik bruto* (PDB). Dengan kata lain negara Yunani mendekati kebangkrutan karena hutang negara yang sangat besar dan sistem perbankan di negara tersebut juga mengalami hal yang sama.

Pada bulan Mei 2010, beberapa negara eropa melalui ECB (*Europe Central Bank*) dan IMF (*International Monetary Fund*) berkomitmen memberikan dana talangan sebesar Rp 110 miliar euro untuk menghindari krisis yang melanda eropa secara menyeluruh. Akan tetapi kenyatannya dalam tempo hanya 1 (satu) tahun berikutnya ternyata krisis yang terjadi malah semakin dalam melanda negara Yunani dan merambah ke negara eropa lainnya seperti : Irlandia, Portugal dan Spanyol. Banyak pihak mengusulkan bahwa untuk mengatasi krisis ekonomi ini tidak hanya pihak negara yang mengatasinya, tetapi juga pihak swasta diharapkan ikut dilibatkan. Hasil dari penyuntikan dana penyelamatan oleh ECB dan IMF tersebut ternyata tidak memberikan hasil yang menggembirakan. Karena berbagai indikator ekonomi yang ada termasuk kurs euro mengalami guncangan hebat sampai mempengaruhi berbagai bursa pasar uang dan pasar modal di berbagai negara asia dan bursa lainnya didunia.

Utang dan Defisit Anggaran Negara

Krisis pertama kali dipicu dari negara Yunani yang terjadi tahun 2009 yang kemudian mendapat dana talangan dari IMF dan negara Eropa. Kemudian dana sebesar Rp 110 miliar euro atau setara dengan Rp 1,314 triliun yang diberikan pada tanggal 21 – 22 juli 2011. Akan tetapi hal ini ternyata tidak mampu menolong lebih lanjut keterpurukan ekonomi makro negara Yunani yang mempunyai utang sampai 328 miliar euro dengan defisit mencapai 10,5% pada tahun 2010. Kondisi ini disikapi negatif oleh rakyat Yunani yang tidak mau menanggung kesalahan yang dibuat oleh para bankir dan eksekutif pemerintahan. Lebih spesifik bahwa kebijakan pengambilan utang untuk membiayai proyek pemerintah, sistem pengawasan pajak yang rendah, manipulasi akuntansi dituding sebagai penyebab awal terjadinya krisis serta tidak kuatnya basis ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi Yunani rata-rata pada tahun 1995 – 2008 mencapai 3,6% , tetapi di prediksi akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sehingga menjadi -3%.

Kondisi serupa terjadi di negara Portugal yang kondisi makro ekonominya juga mengalami kesulitan yang terlihat dari indikator rasio utang terhadap PDB tahun 2010 mencapai 93 % setara 195 miliar euro. Dan defisit anggaran mencapai -9,1 % terhadap PDB. Penyebab terjadinya krisis di negara karena belanja pemerintah yang terlalu besar, beban pinjaman di sektor properti yang besar dan peran produktivitas sektor swasta yang rendah. Akibatnya tingkat pertumbuhan diprediksi akan merun menjadi -1,5 % . Negara Irlandia juga mengalami rasio utang PDB sebesar 96,2 % dengan besaran utang mencapai 148 miliar euro dan defisit anggaran -32,4 %.

Dampak krisis ekonomi di zona Eropa mencapai negara Spanyol yang mempunyai hutang sebesar Rp 60,1 % dari jumlah total hutang Rp 638 miliar euro dan anggaran mencapai defisit -9,2 % serta pertumbuhan ekonominya hanya 0,8 % sampai tahun 2015 mendatang. Penyebabnya serupa dengan kondisi di negara Irlandia yang disebabkan oleh sektor konstruksi. Ternyata efek domino mulai merambah juga ke negara Italy yang mempunyai utang sampai 1,9 triliun euro dan defisit anggaran -4,6 % serta rasio utang 119 % PDB. Penyebab kondisi ini dipicu oleh ketidakmampuan pemerintah melakukan reformasi dan munculnya krisis politik.

Sehingga dapat dikatakan bahwa adanya kesamaan karakteristik krisis yang terjadi di negara Yunani, akan sama halnya yang terjadi di negara zona eropa lainnya yang tergabung dalam PIGS (Portugal, Italy, Greece, Spain). Jadi defisit anggaran yang tinggi dan terperangkap dalam euro yang terlalu kuat. Padahal negara Spanyol dan Italy mempunyai PDB yang lebih besar dibandingkan negara Yunani. Dalam waktu satu minggu harga surat utang negara-negara PIGS jatuh. Dampaknya menjadi efek berantai (*contagion*), harga saham dan valuta asing di seluruh dunia juga mengalami penurunan.

Berbagai kinerja ekonomi yang tidak baik tersebut, mengakibatkan beban besar yang harus di tanggung oleh negara Jerman, Inggris, Perancis untuk menjaga supaya tidak terjadi krisis yang berkelanjutan yang berdampak serius bagi negara mereka. Padahal jika dicermati bahwa negara Inggris sendiri tidak mengikuti mata uang euro, akan tetapi saat ini di negara tersebut juga sudah mulai terjadi PHK yang cukup signifikan dan adanya perampangan diberbagai sektor. Dampak yang sangat serius yaitu berdasarkan data kependudukan bahwa negara-negara yang sekarang terkena dampak krisis ini jumlahnya hampir setengah dari penduduk seluruh eropa dengan kontribusi PDBnya yang mencapai 40 % zona euro.

Mata uang Euro

Banyak pihak mulai menanyakan keberadaan mata uang euro dan keamanan serta kesolitan diantara para anggota uni eropa. Isu ini di landasi kenyataan yang ada mengenai ketidakmampuan mengatasi berbagai permasalahan ekonomi di zona eropa. Apalagi kemudian juga muncul wacana untuk mengeluarkan Yunani dari zona euro. Hal ini tentunya didasarkan akan kekuatiran yang beralasan, disamping ada negara-negara di uni eropa yang tidak mematuhi kesepakatan sehingga diperlukan sanksi tegas.

Sikap Para Investor

Para pelaku ekonomi seperti para investor merasa kuatir akan resiko terjadinya gagal bayar di beberapa negara eropa yang menaikkan tingkat resiko dan menyebabkan keragu-raguan para investor untuk menempatkan dananya di saham ataupun obligasi. Adapun indikator angka *Credit Default Swap* (CDS) atau indikator gagal bayar di negara Italia dan Spanyol berada pada posisi tinggi yaitu 359,62 dan 407,06. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi angka indikator CDS yang menunjukkan resiko investasi suatu negara, berarti semakin tinggi ancaman krisis di negara tersebut. Selain di negara Eropa, di negara amerika serikat sendiri saat ini juga mengalami perekonomian yang kurang menggembirakan walaupun CDS di negara tersebut tidak tinggi hanya mencapai angka 54,33.

Langkah Kongkret Pemimpin Eropa

Diperlukan dengan cepat beberapa langkah kongkret untuk mengatasi krisis ekonomi di zona eropa yang nantinya dikuatirkan akan merambat ke krisis global. Dimana ekonomi global menjadi tidak stabil dan laju ekonomi terhenti. Sehingga di perlukan keseriusan yang tegas dari para pemimpin negara-negara eropa dalam mengatasi krisis finansial ini. Apalagi saat ini, negara Yunani yang telah memperoleh bantuan sebesar Rp 110 miliar euro setahun yang lalu, malah menyatakan tidak sanggup membayar hutang yang telah diterimanya tersebut. Disisi lain negara Irlandia dan Portugal juga mengajukan permohonan pinjaman ke bank central Eropa (ECB) dan IMF untuk memulihkan perekonomian di negara mereka.

Tetapi hal ini menjadi bahan perdebatan bagi negara-negara mapan di Uni Eropa dalam membantu memberikan solusi penyelamatan krisis ekonomi di negara Yunani, supaya tidak merambat ke negara di kawasan eropa lainnya. Ada beberapa opsi yang mungkin akan di ambil oleh Uni Eropa diantaranya yaitu dengan memperpanjang masa pengembalian utang dan paket pemberian bantuan tambahan finansial.

Pertentangan dalam penangguhan memperpanjang utang negara Yunani terjadi diantara para menteri keuangan zona eropa dan bank central eropa. Di satu sisi ada yang berpendapat untuk memperpanjang masa pengembalian utang sekaligus memberi tambahan finansial. Sedangkan pendapat lain tetap meminta negara Yunani mematuhi kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, karena jika dibantu pinjaman lagi maka malah akan menambah jumlah utang yang luar biasa besarnya. Hal ini disinyalir akan mengosongkan kas bank-bank di negara Yunani dari surat utang dan obligasi yang disyaratkan menjadi jaminan untuk memperoleh pinjaman dari bank central eropa.

Ada pula wacana untuk memberikan pinjaman tambahan bagi Yunani dengan jaminan berupa pulau-pulau dan tempat bersejarah di negara tersebut sebagai jaminan, karena obligasi negara tersebut sudah tidak bernilai. Hal tersebut tentunya di tentang oleh pemerintahan Yunani yang lebih memprioritaskan cara swastanisasi beberapa aset negara seperti bandara udara dan jalan-jalan tol yang diharapkan bisa memberikan

dana kas sebesar Rp 50 miliar euro. Sangatlah penting bagi pemerintah Yunani untuk menegatkan kebijakan ekonominya.

Usulan swastanisasi beberapa aset negara, tentunya perlu dipertimbangkan lagi tentang plus minusnya kebijakan tersebut. Karena akan mendapat tantangan yang meluas dari masyarakat negara tersebut. Hal ini terbukti dengan mulai maraknya berbagai demonstrasi terkait menentang kebijakan tersebut. Kondisi ini juga mulai melanda di negara eropa lain, seperti di negara spanyol. Tuntutan masyarakat pada umumnya sama yaitu : pengadaan lapangan pekerjaan, rumah bagi rakyat, menentang gaji tinggi bagi para politikus dan bankir.

Perbedaan Krisis

Perbedaan krisis yang terjadi di amerika serikat dan di Eropa. Jika krisis di Amerika serikat yang terjadi tahun 2008 di picu oleh krisis perbankan dan lembaga keuangan yang terlalu banyak memberikan kredit perumahan dengan standar rendah (*subprime loans*) dan transaksi derivatif yang sangat besar. Sedangkan krisis yang terjadi di benua eropa di sebabkan oleh utang pemerintah yang besar, akibat peminjaman pada tahun-tahun sebelumnya untuk membiayai pengeluaran yang kurang tepat sasaran.

Apalagi di lain pihak banya bank investasi yang terus menawarkan peminjaman kepada pemerintah Yunani dengan instrumen *balance off sheet*. Sehingga lama kelamaan jumlah utang semakin membumbung tinggi, ditambah ditemukannya faktor rekayasa pada laporan keuangannya. Akibatnya rating utang dan harga surat utang pemerintah Yunani jatuh.

Antisipasi Negara Indonesia

Bagaimana dampaknya bagi negara kita Indonesia, ternyata tidak berdampak cukup signifikan dikarenakan ekspor (*eksposure*) ke negara europa hanya mencapai 1 % dari nilai total ekspor Indonesia sehingga masih sangat terbatas. Transaksi keuangan mencapai 10 % dan jumlah modal yang ditanamkan di Indonesia masih dibawah 2 %. Walaupun begitu posisi negara Indonesia tetap harus siap-siap menghadapi berbagai kemungkinan terburuk, yang bisa diwujudkan dalam bentuk perubahan APBN (APBN-P) yang dimungkinkan. Asumsi dalam APBN-P di harapkan telah memperhitungkan berbagai resiko-resiko fiskal dan tetap dipersiapkannya instrumen stabilisator apabila ada perubahan yang bisa terserap dengan melakukan pengelolaan resiko.

Terdapat beberapa hal yang cukup baik di perekonomian Indonesia dalam upaya menangkal dampak krisis dari eropa (*external shock*), yaitu : APBN Indonesia yang saat ini lebih prudent, cadangan devisa (*reserve*) yang cukup besar, adanya capital inflow yang masuk ke dalam pasar, serta berbagai kebijakan moneter yang diharapkan cukup dipahami kalangan pelaku ekonomi.

Walaupun begitu perlu diwaspadai karena utang pemerintah Indonesia selama lima tahun terakhir meningkat sebnayak 30% mencapai Rp 178 miliar US dollar dengan bunga yang tinggi. Padahal kombinasi utang dan defisit anggaran sangat membahayakan. Apalagi jumlah dana jangka pendek (*hot money*) yang masuk ke Indonesia lebih tinggi dibanding sebelum krisis Yunani. Diperkirakan jumlahnya mencapai 110 miliar US dollar. Faktor-faktor tersebut juga bisa menyebabkan Indonesia cukup rentan (*vulnerable*) terhadap guncangan ekonomi eksternal. Walaupun rasio utang terhadap PDB Indonesia rendah. Tetapi yang lebih penting adalah indikator kemampuan pemerintah dalam membayar utang yaitu rasio pembayaran pokok dan bunga terhadap pendapatan pemerintah yang sudah sangat tinggi mencapai sepertiga. Disamping itu ada faktor yang perlu

dipertimbangkan pula dari utang sektor swasta yang kemungkinan berpotensi menambah beban utang pada umumnya.

Teori Krisis Ekonomi

Krisis Ekonomi dapat di tinjau dari beberapa aspek, diantaranya yaitu krisis nilai tukar (*currency crisis*) yang indikatornya adanya devaluasi mata uang domestik dan perubahan kebijakan dari sistem nilai tukar *fixed exchange rate* menjadi sistem nilai tukar *flexible/floating exchange rate*. Menurut pendapat Krugman, 1979 dan Flood&Garber, 1984 terdapat 3 (tiga) model krisis berdasarkan pengalaman beberapa negara yang pernah mengalami krisis ekonomi, yaitu : *First Generation Model*, *Second Generation Model*, *Third Generation Model*

Adapun yang dimaksud dengan *First Generation Model* (FGM) atau *exogeneous policy model* adalah model krisis ini lebih menitikberatkan kepada ketidakkonsistenan kebijakan fiskal, moneter dan nilai tukar. Penyebab utamanya terjadinya krisis karena adanya serangan para spekulator terhadap nilai tukar suatu negara yang memaksa negara tersebut mengubah nilai tukar mata uangnya. Terdapat beberapa faktor yang menjadi dasar analisis dari model FGM ini yaitu *full employment*, *single tradable goods*, *small open economy*, *exogeneous output*, *PPP*.

Selain faktor diatas terdapat beberapa asumsi pada kondisi *perfect foresight* dengan mempunyai 3 (tiga) jenis aset seperti : *domestic money*, *domestic bond* dan *foreign bond*. Serta asumsi terdapat *monetary base*, *fixed exchange*, domestik credit meningkat dengan laju yang tetap untuk membiayai defisit pemerintah. Secara empiris *First Generation Model* (FGM) pernah terjadi di beberapa negara Amerika latin pada periode tahun 1970 – 1980an yang ditandai dengan meningkatnya defisit APBN, cadangan devisa semakin menipis, tingkat inflasi yang tinggi dan terjadinya *over valued* dari nilai tukar mata uang domestik.

Second Generation Model (SGM) atau *endogeneous policy model*, sering pula disebut *self fullfiling process*. Terdapat asumsi dasar dalam pelaksanaan SGM yaitu para anggota ERM (Exchange Rate Mechanism) ingin mempertahankan nilai tukar yang ada, karena diharapkan dapat memberi manfaat seperti : laju inflasi rendah dan stabil, untuk mendorong produksi dalam negeri, keuntungan kebijakan devaluasi dianggap semakin tinggi jika semakin banyak investor yang berpikir bahwa mata uang tersebut harus didevaluasi.

SGM ini merupakan fenomena krisis yang terjadi di Eropa dengan *European Exchange Rate Mechanism* (ERM) pada tahun 1992. Pada masa tersebut antar negara-negara Eropa dalam kerangka Eropa Uni (EU) berlaku *fixed exchange rate system* atau tepatnya *crawling peg system*. Dimana pada setiap mata uang mempunyai nilai tengah dan dimungkinkan untuk bergerak. Kemudian masing-masing Bank Sentral berupaya untuk mempertahankan nilai tukarnya dalam *band* tersebut dengan cara menjual/membeli forex. Jika upaya tersebut tidak berhasil, maka nilai tukar harus diubah. Mata uang dipegged terhadap DM Jerman yang dinilai mempunyai tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Tetapi disisi lain, beberapa negara Eropa lainnya yang sedang mengalami perekonomian yang lesu. Berusaha untuk mempertahankan nilai tukar yang tetap dengan DM Jerman, oleh karena itu mereka harus ikut menaikkan tingkat bunga. Tetapi terjadi dilema antara kepentingan internal masing-masing negara sehingga harus menurunkan tingkat bunga untuk memerangi resesi. Akibatnya terjadi konflik kepentingan seperti terlihat dari beberapa kebijakan yang diambil. Sebagai contoh negara-negara : Italia, Finlandia, Spanyol mendevaluasi mata uangnya sebesar 7%, 13% serta 5 %. Selain itu adanya kebijakan kenaikan tingkat suku bunga di Swedia dari 24% menjadi 75%. Inggris menaikkan tingkat bunga dari 10% menjadi 15%. Swedia dan Irlandia juga menaikkan suku bunganya sebesar 300% dan 500%.

Third Generation Model (TGM) atau disebut juga *Asian Crisis*. Krisis Asia ini di mulai di Thailand, kemudian mempengaruhi ke Indonesia, Malaysia, Korsel, dan Filipina. *Third Generation Model* (TGM) adanya asumsi peran *moral hazard* yang berupa *implicit government guarantee* yang bersedia membail-out para perusahaan swasta dan bank yang dalam masalah dan menjamin *investor's future revenue* serta *balance sheet effects*. Dampaknya terjadi *excessive borrowing* dan *lending*. Walaupun jika dilihat angka defisit pemerintah tidak terlalu tinggi sebelum krisis, tetapi terjadi penolakan kreditur luar negeri untuk melakukan refinance hutang, sehingga memaksa pemerintah untuk membantu dan menjamin outstanding hutang luar negeri. Selain itu ekspektasi terhadap inflasi ke depan memicu *speculative attack* terhadap mata uang domestik yang secara umum di-fixed.

Apabila kita menganalisa krisis yang terjadi di kawasan Asia berkaitan dengan modal jangka pendek atau *hot money* yang sangat *isolatible*. Pada awal tahun 1990an banyak negara Asia yang meliberalisasi *capital account*, sehingga mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dengan kondisi fundamental yang kelihatannya *sound*. Liberalisasi *capital account* menyebabkan *capital inflows* besar. Umumnya dana jangka pendek yang banyak digunakan untuk membangun sektor property dan masuk ke bursa saham.

Data beberapa negara ASEAN memperoleh *surplus capital account* terbesar US\$55 milyar pada tahun 1995. Tetapi pada tahun 1998, *deficit capital account* sekitar US\$59 milyar. Aliran modal masuk dari luar negeri berhenti dan berubah menjadi *massive capital outflow*. Implikasinya melemahkan mata uang beberapa negara Asia melemah. IDR: > 80%, Baht: 50%, Won: 55%. Akhirnya kebijakan yang diambil untuk mengurangi *capital outflow*, yaitu dengan menaikkan tingkat bunga. Kondisi ini menimbulkan kesulitan dalam neraca bank-bank, NPL naik. Akibatnya likuiditas perbankan menipis; kepercayaan masyarakat terhadap bank turun, dan pembukaan L/C (*Letter of Credit*) untuk fasilitasi ekspor impor mengalami kesulitan untuk mendapat kepercayaan dari pihak luar.

Sehingga krisis ekonomi yang terjadi sekarang menimbulkan teori krisis baru yaitu *Fourth Generation Model* dengan penyebab utama yaitu lemahnya sistem pengawasan oleh negara atau lembaga yang berwenang terhadap pelaksanaan transaksi keuangan di pasar modal, pasar uang dan berbagai macam produk derivativenya.

Ekonomi Islam sebagai Solusi Alternatif

John K. Galbraith, dalam bukunya *The New Industrial State* menyatakan bahwa, “konsumsi barang telah menjadi sumber kenikmatan yang paling besar, dan tolok ukur prestasi manusia yang paling tinggi”. Akibatnya perilaku hedonisme, materialisme dan konsumtivisme melanda hampir seluruh aspek lapisan anggota masyarakat. Saat ini semakin meningkat keinginan yang berlebihan untuk memenuhi kebutuhan individu baik yang berupa material dan pemuasan keinginan-keinginan semata. Hal ini dapat dikatakan sebagai akibat dari fenomena kapitalisme modern. Tetapi disisi lain masih sedikit usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan spiritual, dan kebutuhan akan pemerataan distribusi kesejahteraan di masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menurut konsep sistem ekonomi kapitalis perlu dikaji ulang. Karena pada kenyataannya upaya peningkatan kesejahteraan tidak diikuti oleh distribusi pemerataan kesejahteraan. Kondisi ini mengakibatkan munculnya gap yang semakin melebar antara sosial ekonomi golongan orang kaya dan golongan orang yang miskin. Berbagai kebutuhan sandang, pangan, papan (perumahan) yang layak tidak dapat terpenuhi dengan baik. Apalagi sektor pendidikan dan kesehatan sangat jauh dari mencukupi. Banyak

masalah baru sesungguhnya tengah diciptakan bagi golongan orang miskin melalui meningkatnya tingkat inflasi harga sehingga harga-harga kebutuhan semakin mahal.

Saat ini, menurut E.J.Mishan dalam bukunya *The Cost of Economic Growth*, ada tanda-tanda peningkatan simptom anomali seperti stress, depresi, frustrasi, kehilangan kepercayaan, alinasi antara orangtua dan anak, perceraian dan tindakan anarkhis. Ketegangan dimana-mana lebih terasa daripada keharmonisan, ketidakadilan lebih kentara daripada keadilan. Selain itu ternyata bahwa fenomena peningkatan volume barang dan jasa belum bisa memberikan sumbangan bagi kebahagiaan manusia. Karena kebahagiaan hakiki terletak pada kedamaian jiwa, yang tidak sekedar merupakan fungsi material tetapi juga keadaan spiritual. Distribusi pendapatan yang tidak adil yang disertai dengan perbedaan tingkat kehidupan yang mencolok membuat orang terus menerus menderita dan tidak bahagia. Orang tidak pernah puas dan tidak pernah mau memenuhi kewajiban terhadap orang lain. Akibatnya, tingkat solidaritas sosial semakin melemah dan masyarakat mengalami degradasi moral yang memperhatikan.

Menurut Daniel Bell, pada sistem kapitalisme modern terdapat kombinasi tiga kekuatan utama, yaitu: kerakusan borjuis, masyarakat politik demokratis dan semangat individualistis, telah gagal menjawab semua problema di atas. Pada faham yang ditawarkan Marxisme pun tidak mampu memberikan penyelesaian, karena sebab yang sesungguhnya dari masalah manusia bukanlah perjuangan kelas, tetapi degradasi moral. Dan tidak diragukan lagi, bahwa Marxisme memainkan peranan penting dalam meremehkan moral, sama dengan peranannya dalam mendorong kecenderungan konsumtif. Sehingga sistem kolektif dalam marxisme tersebut gagal memecahkan hampir semua masalah yang dihadapi oleh kapitalisme. Berdasarkan paparan-paran di atas dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan sistem ekonomi yang menjanjikan solusi tepat dengan berharap pada konsep sistem ekonomi Islam.

Keunggulan sistem ekonomi Islam berupa menyatunya nilai moral dan nilai spiritual didalam sistem tersebut. Nilai moral itulah yang tidak ada dalam kegiatan perekonomian model sistem ekonomi kapitalis ala barat. Jika tidak ada kontrol nilai moral, maka yang timbul adalah perilaku para pelaku ekonomi yang cenderung merusak dan dapat merugikan masyarakat umum. Sebagai contoh munculnya praktek-praktek monopoli, riba dan berbagai teknik kecurangan-kecurangan yang terus muncul dalam berbagai modus.

Kondisi diatas sudah mulai disadari oleh para ekonom, tentang pentingnya nilai-nilai moral dalam ekonomi. Fritjof Capra dalam bukunya, *"The Turning Point, Science, Society, and The Rising Culture*, menyatakan ilmu ekonomi merupakan ilmu yang paling bergantung pada nilai dan paling normatif di antara ilmu-ilmu lainnya. Ekonom lainnya E.F Schummacher, ekonom Ervin Laszlo dalam bukunya, *"3rd Millenium, The Challenge and the Vision"* mengemukakan hal serupa. Alternatif solusi yang ditawarkan oleh konsep ekonomi Islam dalam menghadapi krisis ekonomi yang terjadi saat ini ada 2 (dua), yaitu: pertama, solusi yang bersifat parsial. Kedua, solusi yang bersifat komprehensif (*kafah*). Dalam solusi yang bersifat parsial, sistem ekonomi Islam berusaha mengganti faktor bunga sebagai faktor produksi dengan sistem bagi hasil, kemudian menghapus pasar sekunder dan pasar derivatif, dan memunculkan pasar modal serta perbankan syariah. Akan tetapi hal ini dianggap tidak akan memberikan hasil optimal jika sistem ekonomi tersebut sebenarnya tetap berjalan di atas guidance sistem ekonomi kapitalisme. Oleh karena itu sangat perlu untuk menerapkan sistem ekonomi Islam secara komprehensif (*kafah*), bukan penerapan secara parsial yang kurang memberikan dampak yang berarti. Didalam ajaran sistem ekonomi Islam terdapat 3 (tiga) asas pertama cara memperoleh harta

kekayaan (*al milkiyah*), kedua cara mengelola kepemilikan harta kekayaan yang telah dimiliki (*tasharuruf fil milkiyah*), dan ketiga cara mendistribusikan kekayaan tersebut di masyarakat (*tauzi 'ul tsarwah bayna an-naas*)

Dalam hal kepemilikan harta kekayaan di sistem ekonomi Islam dibagi menjadi tiga jenis pertama Kepemilikan individu (*private property*), kedua Kepemilikan oleh negara (*state property*), ketiga Kepemilikan oleh umum (*collective property*)

Kepemilikan individu dapat memiliki kekayaan dengan cara-cara kepemilikan tertentu sebagai berikut : dengan bekerja, adanya warisan, kebutuhan akan harta untuk mempertahankan hidup, harta yang diperoleh oleh seseorang tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun. Khusus harta dengan kepemilikan individu yang masuk mekanisme pasar (*syariah*), sedangkan 2 (dua) jenis harta yang lain mengalir ke lembaga *baitul mal*.

Kepemilikan umum dimaksud benda-benda yang dimiliki oleh suatu komunitas yang saling membutuhkan. Ekonomi Islam melarang kepemilikan benda tersebut dikuasai oleh seseorang atau sekelompok kecil orang. Adapun benda-benda yang termasuk dalam kepemilikan umum dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu pertama Benda yang merupakan fasilitas umum, kedua Benda yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan, dan ketiga Bahan tambang yang jumlahnya sangat besar.

Kepemilikan negara berupa harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin yang pengelolannya menjadi wewenang negara, dimana negara dapat memberikan kepada sebagian warga negara sesuai kebijakannya. Untuk mewujudkan sistem tersebut diatas dibutuhkan perubahan peran negara yang lebih berani dengan mengubah sistem perekonomian menjadi berdasarkan Islam secara menyeluruh.

Sistem Ekonomi Islam merupakan bagian dari seluruh sistem ajaran agama Islam yang berhubungan erat dan komprehensif. Adanya kesesuaian, keselarasan dan keseimbangan dalam fitrah manusia inilah yang tidak menyebabkan konflik kepentingan. Kebebasan berekonomi terkendali (*al-hurriyah*) menjadi ciri dan prinsip sistem ekonomi Islam, seperti kebebasan memiliki unsur produksi dalam menjalankan roda perekonomian. Kebebasan individu tetap ada walaupun dengan syarat tidak merugikan kepentingan bersama atau publik masyarakat umum. Sehingga dengan kondisi tersebut diharapkan tidak akan merusak hubungan tatanan sosial. Adapun penegadaniannya dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya, atas perintah Allah Swt, melalui program zakat, infaq dan sedeqah.

Ciri perekonomian Islam juga mengedepankan persaingan bebas. Tetapi persaingan yang tetap ada tanggungjawabnya berupa kepatuhan terhadap aturan main seperti : barang tersebut tidak cacat, pasar tidak terdistorsi oleh tangan-tangan yang sengaja memperlmainkannya, Larangan adanya bentuk monopoli, kecurangan, dan Larangan praktek riba.

Kesimpulan

Sistem ekonomi kapitalis mengalami krisis yang kesekian kalinya. Dimulai pada fase pertama krisis ekonomi dimulai pada tahun 1929 yang berlangsung selama 4 (empat) tahun. Kemudian fase kedua krisis ekonomi terjadi pada awal tahun 1960 sampai 1970. Fase ketiga terjadi pada tahun 2008 dan telah berlangsung sampai saat ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem ekonomi kapitalis ternyata tidak dapat dipergunakan sebagai sistem ekonomi global dan malahan dianggap telah gagal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat ekonomi dunia. Hal tersebut terbukti dengan semakin maraknya demonstrasi menentang sistem kapitalis oleh masyarakat di berbagai negara barat termasuk di Amerika Serikat.

Moral sebagai dasarnya oleh karena kegagalan berbagai macam ideologi dan sistem ekonomi dunia tersebut, maka sejak beberapa dekade yang lalu muncul gelombang kesadaran baru pakar ekonomi dunia untuk menemukan sistem ekonomi baru yang bisa mewujudkan kemakmuran dan keadilan. Sistem baru itu kini diarahkan kepada sistem ekonomi Islam. Gerakan intelektual untuk mengaktualisasikan kembali ekonomi Islam mulai muncul pada dekade 1970-an.

Sistem ekonomi Islam memfokuskan pada 3 (tiga) aspek yaitu : cara memperoleh harta kekayaan (al milkiyah), cara mengelola kepemilikan harta kekayaan yang telah dimiliki (tasharuf fil milkiyah) dan cara mendistribusikan kekayaan tersebut di masyarakat (tauzi'ul tsarwah bayna an-naas).

Saat sekarang ini merupakan momentum yang tepat untuk mengevaluasi sistem ekonomi yang telah berjalan menurut konsep barat, yang diharapkan dapat diganti dengan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan lebih bermoral. Solusi yang bisa ditawarkan adalah konsep ekonomi syariah Islam. Tentunya hal ini perlu perjuangan yang terus menerus untuk menyakinkan semua pihak tentang sistem ekonomi Islam yang lebih berkeadilan. Sudah saatnya bagi negara-negara yang mayoritas masyarakatnya mayoritas muslim untuk lebih dahulu mempelopori dan memasyarakatkan dengan disertai bukti nyata manfaat dari sistem ekonomi Islam ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafii. 2001. *"Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik"*. Gema Insani. Jakarta
- Al Jawi, M Shiddiq 2010. *Sistem Ekonomi Islam*. Jurnal Ekonomi. Jakarta
- Az Zain, SA. 1981. *Syariat Islam : Dalam perbincangan Ekonomi, Politik, dan Sosial sebagai Studi Perbandingan*. Bandung.
- Bell, Daniel. 1960. *"The End of Ideology"*. first edition
- Capara, Fritjop. .2007. *"Turning Point, Science, Society and the Rising Culture"*. Jejak. Yogyakarta
- Galbaith, John K. 1987. *'The New Industrial State'*. Princeton.
- Laszlo, Ervin. 1997. *"Third Millenium, the Chalenge and the Vision"*. Gaia Books.
- Mihan, EF. 1967. *"The Cost of Economic Growth"*. Staples Press
- Mucdartsyah, Sinung. 2000. *Manajemen Dana Bank*. Bina Aksara. Jakarta
- Schummacer, EF. 1977. *"Small is Beautiful : Meta Economics"*
- Ramli, Rizal. 2010. *Krisis Utang Yunani*. Sindo. Jakarta